

Perencanaan penggunaan lahan untuk  
pembangunan rendah emisi

*Luwes*

Land-use planning for low-emission  
development strategies

# NEWS BULLETIN

VOLUME II NO.1/MAY 2015



## MERAJUT CITA-CITA PEMBANGUNAN HIJAU DI PAPUA

Growing green development in Papua

## SEUNTAI PESAN DARI WAMBENA DAN YEPASE UNTUK DUNIA

A message from Wambena and Yepase  
to the world

## POKJA PEMBANGUNAN RENDAH EMISI: KONTRIBUTOR PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI PAPUA DAN SUMATERA SELATAN

Low-emissions development working groups: contributors  
to green economic development in Papua and South  
Sumatra



# Dari Redaksi

## Editor's notes

**L**UWES News Bulletin kembali menjumpai para pembaca dengan berbagai ragam informasi, cerita dan pembelajaran tentang kegiatan yang dilakukan oleh ICRAF dalam mendukung pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), World Agroforestry Center (ICRAF), lembaga penelitian yang memiliki misi untuk meningkatkan kebijakan, praktik dan pelaksanaan penggunaan lahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, bersama konsorsium mitranya melakukan berbagai kegiatan untuk membangun perencanaan tata guna lahan yang baik sebagai solusi penting dalam mewujudkan pembangunan yang rendah emisi.

Terdapat dua kegiatan program yang sedang dilakukan ICRAF saat ini, yaitu kegiatan program *Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies* (ParCiMon) yang dilakukan di Papua dengan fokus pada tiga kabupaten yaitu Jayawijaya, Jayapura dan Merauke serta kegiatan program *Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia* (LAMA-I), dilakukan di dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan yang berfokus di Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, serta Provinsi Papua yang berfokus di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya dan Merauke.



**T**his Luwes Bulletin is back in this edition to greet the readers with a wide variety of information, stories and lessons learnt relating to the activities carried out by ICRAF in support of sustainable low-emission development in Indonesia.

To contribute to the effective implementation of Presidential Regulation No. 61 of 2011 on the National Action Plan for the Reduction of Greenhouse Gas Emission (RAN-GRK), the World Agroforestry Center (ICRAF), a research institution with a mission to develop policies, practices and actions relating to the land use that benefit the community and environment, together with its partner consortium has undertaken a series of activities to promote proper land use planning as a critical solution aimed towards achieving low-emission development.

Two programs are currently being implemented by ICRAF, namely 'Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies' (ParCiMon) in Papua, targeting the districts of Jayawijaya, Jayapura and Merauke, and 'Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia' (LAMA-I), implemented in the province of South Sumatera, specifically in the district of Musi Rawas, Musi Banyuasin and Banyuasin, and the province of Papua, with a focus on the districts of Jayapura, Jayawijaya and Merauke.



*LUWES News Bulletin* edisi ketiga ini, menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung kedua program tersebut. Diantaranya, mengulas tentang kunjungan perwakilan Kedutaan Denmark, Lars Moller ke Papua untuk memberikan dukungan dalam upaya strategi pembangunan rendah emisi di Indonesia, konsultasi publik tentang strategi pembangunan rendah emisi di Jayawijaya untuk mendapatkan masukan dan mensosialisasikan rencana aksi mitigasi yang akan dilakukan.

Dalam edisi kali ini juga disampaikan tentang Papua yang sedang berupaya merajut cita-cita pembangunan rendah emisi, Seuntai Pesan dari Wambena-Yepase serta kisah inspiratif dari Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten Jayapura yang turut aktif melakukan upaya aksi mitigasi pengurangan karbon.

Terdapat pula berita dari Lokakarya Pembelajaran Lintas Kabupaten (*Cross Learning*) dari 6 Pokja Pembangunan Rendah Emisi. Keenam pokja tersebut berasal dari tiga kabupaten di Sumatera Selatan dan tiga kabupaten di Papua yang bersama-sama berbagi informasi dan pembelajaran dalam menyusun strategi aksi mitigasi menuju pembangunan ekonomi hijau. Berita dari Sumatera Selatan adalah terseleggaranya tiga konsultasi publik di tiga kabupaten yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Banyuasin.

Dengan terbitnya *LUWES News Bulletin* edisi ketiga ini, diharapkan dapat menginspirasi serta menambah informasi pembaca terkait upaya aksi mitigasi yang sedang dilakukan melalui ParCiMon dan LAMA-I.

Selamat membaca.

Salam lestari

This third edition of the *LUWES News Bulletin* describes a number of activities that have taken place in support of the programs. Among them are stories on the visit made by a delegate from the Danish embassy, Lars Moller, to Papua to lend support to the low-emission development strategies in Indonesia, public consultation events on low-emission development strategies in Jayawijaya with the purpose of garnering input and disseminate planned mitigation actions to be taken.

This edition also presents a story on how Papua is building its aspiration of low-emission development, a message from Wambena-Yepase and an inspirational account of the Jayapura working group chairperson who is actively engaged in implementing mitigation actions to reduce carbon.

A report is also given on District Cross-Learning Workshops held by six Low Emission Development Working Groups. The six working groups are from three districts in South Sumatera and three districts in Papua, who were enthusiastic in sharing information and lessons learnt in preparing mitigation action strategies towards green economic development. The latest news from South Sumatera tells about the holding of three public consultations in three districts, namely Banyuasin, Musi Banyuasin, and Banyuasin.

The publication of the third edition of the *LUWES News Bulletin* is hoped to inspire and inform readers on the mitigation actions being carried out through the ParCiMon and LAMA-I programs. We hope you will enjoy!

Happy reading

Regards

**EDITORIAL TEAM**  
**LUWES NEWS BULLETIN**  
Volume II No.1  
May 2015

Editors in chief	:	Suyanto and Sonya Dewi
Managing editors	:	Robert Finlayson, Burhanuddin Zein, Andree Ekinadina, Feri Johana, and Yessi Dewi Agustina
Contributors	:	ParCiMon and LAMA-I team
Layout and design	:	Sadewa
Editorial secretariat	:	Tikah Atikah, Cintin Sakina
Cover photo	:	Rachman Pasha, Yessi Dewi Agustina, Rob Finlayson, Feri Johana

# Daftar Isi

## Table of Contents



02	<b>DARI REDAKSI</b> Editor's notes
05	<b>MERAJUT CITA-CITA PEMBANGUNAN HIJAU DI PAPUA</b> Growing green development in Papua
10	<b>JAYAWIJAYA: MEMBAWA INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU YANG LESTARI</b> Jayawijaya: carrying Indonesia towards sustainable green development
14	<b>SEUNTAI PESAN DARI WAMBENA DAN YEPASE UNTUK DUNIA</b> A message from Wambena and Yepase to the world
17	<b>NEGARA DENMARK TURUT SERTA MENJAGA HUTAN DI PAPUA</b> Denmark helps mitigate climate change in Papua
21	<b>TIGA KABUPATEN BERSAMA-SAMA MENUJU PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI SUMATERA SELATAN</b> Three districts working together for green economic development in South Sumatra
25	<b>POKJA PEMBANGUNAN RENDAH EMISI: KONTRIBUTOR PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI PAPUA DAN SUMATERA SELATAN</b> Low-emissions development working groups: contributors to green economic development in Papua and South Sumatra
28	<b>BIOGRAFI KETUA POKJA INISIATIF PEMBANGUNAN RENDAH EMISI KABUPATEN JAYAPURA</b> Chairperson of the Jayapura District Low-Emissions Development Initiative Working Group





# Merajut Cita-cita Pembangunan Hijau di Papua

Growing green development in Papua

*Lokakarya Provinsi Papua ajang berbagi pengalaman diantara kabupaten lokasi program ParCiMon dan LAMA-I, momentum tepat untuk diseminasi dan sinergitas hasil pembelajaran rencana aksi pembangunan rendah emisi di Papua.*

*The Papua Provincial Workshop shared experience from the districts where the ParCiMon and LAMA-I projects are implemented, helping to build Papua's low-emissions development.*

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan kegiatan Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low Emissions Development Strategies (ParCiMon) dan Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA)-I di Papua, Pemerintah Daerah Papua bersama program ParCiMon dan LAMA-I menggelar Lokakarya Provinsi Papua di bulan November 2014 silam di Ballroom Hotel Aston Jayapura. Lokakarya ini merupakan sebuah upaya untuk meraih dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua disamping juga untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk implementasi ParCiMon dan LAMA-I.

Entering the third year of the Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low Emissions Development Strategies (ParCiMon) and Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA)-I projects in Papua, the Papua Provincial Government in collaboration with the ParCiMon and LAMA-I projects held a provincial workshop in November 2014 at the Aston Hotel, Jayapura. The workshop was designed to solicit support from the provincial government and to garner input from various stakeholders on the implementation of ParCiMon and LAMA-I.

Asisten II Bidang perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. Ellia Loupatty, MM dalam sambutannya mengungkapkan bahwa 'Program ini merupakan kegiatan yang tidak hanya menyenangkan hati kita semua namun juga bermanfaat bagi alam, sehingga diharapkan akan mencapai kesuksesan. Dengan upaya yang dilakukan oleh ICRAF dan mitra pelaksana untuk langsung mengajarkan dan melatih masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan hijau di Indonesia, khususnya Papua, diharapkan program ParCiMon dan LAMA-I mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Pemerintah Provinsi dan bisa menjadi model bagi provinsi-provinsi lainnya.'

Lokakarya ini dihadiri oleh Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas), pemerintah Provinsi Papua dari berbagai sektor terkait pembangunan, dan pemerintah Kabupaten tiga lokasi kegiatan yaitu Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Asmat, Perwakilan dari NGO, akademisi dan masyarakat Papua.

ParCiMon dan LAMA-I berkolaborasi dalam mendukung pembangunan hijau di Papua dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil pada proses perencanaan pemantauan dan evaluasi

The Papua Provincial Secretary's Assistant 2 for Economy and Development, Drs Ellia Loupatty MM, in her welcoming remarks explained that 'the projects are not an undertaking aimed at satisfying ourselves but at bringing benefit to the environment and, as such, we have high hopes for their success. With the work of ICRAF and the implementing partners in directly teaching and training the people to enhance the capacity of their communities and the government in achieving green development in Indonesia, particularly Papua, it is expected that the ParCiMon and LAMA-I will be able to create useful initiatives for the provincial government and a model for other provinces.'

The workshop was attended by representatives of the National Development Planning Agency (Bappenas), various development agencies of the provincial government, and the three districts where the project sites are located, namely, Jayapura, Jayawijaya and Merauke. Also present were representatives of the governments of the districts of Biak Numfor, Yapen Islands, and Asmat, and from several NGOs, communities and educational institutions in Papua.

ParCiMon and LAMA-I collaborate to encourage the active participation of civil society in the monitoring and evaluation of land-based, low-emissions development. The collaboration has been manifested through building the capacity of regional governments and others in preparing local mitigation



pembangunan rendah emisi berbasis lahan dengan memberikan pembekalan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam upaya menyusun aksi mitigasi lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi dan wujud kontribusi penting dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional.

Lokakarya Provinsi ini diawali dengan pemaparan implementasi kedua Program ParCiMon dan LAMA-I di Papua yang disampaikan oleh masing-masing mitra pelaksana. PLCD Task force memaparkan bahwa telah disepakatinya rencana kegiatan bersama BP REDD+ dokumen SRAP 2012-2013 untuk Papua dan Papua Barat, penyempurnaan baseline dan peta kadastral dan adanya kesepakatan bahwa REL Papua menggunakan metode *forward looking*. Beberapa program prioritas telah disepakati salah satunya adalah harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan aturan. Dengan salah satu rekomendasi yang diberikan adalah perlunya penetapan suatu lembaga fungsional untuk membangun basis data tanah Papua.

Dr. Sonya Dewi selaku ICRAF Indonesia Country Coordinator menerangkan bahwa program ParCiMon dan LAMA-I dapat membantu para pihak di kabupaten dalam hal membuat perangkat, dan penguatan kelembagaan sehingga kegiatan pembangunan rendah emisi di Papua ini bisa ditularkan di tempat lain di Indonesia. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan antara agenda global, strategi dan program nasional dan implementasi lokal. Salah satu pembelajaran yang bisa diambil dari daerah lokasi kegiatan proyek ParCiMon dan LAMA-I bahwa tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua konteks daerah. Sinergi antara sub sektor di dalam sektor lahan, berbagai sumber pendanaan, berbagai program, metode, data, dan institusi diharapkan dapat menunjang tercapainya kesepakatan bersama untuk dapat membangun pemahaman, kemauan dan kapasitas dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.

Masing-masing Pokja di tiga kabupaten Lokasi Program ParCiMon dan LAMA-I di Papua berkesempatan untuk memaparkan proses pelaksanaan kedua program di masing-masing Kabupaten. Pokja Inisiatif Pembangunan rendah emisi (Pokja IPRE) Kabupaten Jayapura berbagi pengalaman mengenai proses penyusunan delapan langkah strategis aksi penurunan emisi berbasis lahan menuju pembangunan rendah emisi yang telah diidentifikasi. Kedelapan aksi mitigasi ini merupakan

actions as a part of low-emissions development strategies. These form an important contribution to the success of the national climate-change mitigation strategy.

The workshop began with a presentation on the implementation of ParCiMon and LAMA-I in Papua by each of the implementing partners. The PLCD Task force explained that an agreement had been reached on a joint activity with BP REDD+ with respect to the SRAP 2012–2013 document for Papua and West Papua provinces, improvements to the baseline and cadastral map, and an agreement that establishment of the reference emissions level for Papua will use a 'forward-looking' method. One of the agreed priority programs was the alignment of policies and regulations and one of the recommendations was the need for the formation of a functional body to construct a land database for Papua.

Dr Sonya Dewi, ICRAF Indonesia country coordinator, explained that ParCiMon and LAMA-I can help the district develop methods, tools and institutional capacity and eventually make low-emissions development in Papua replicable in other parts of the country.

A further action to be done was the alignment of global and national programs with local work. One of the lessons from ParCiMon and LAMA-I was that there was no one single strategy that could fit into the numerous regional contexts. Synergy between the sub-sectors within the land-based sector, the various financing sources, programs, methods, data, and institutions was needed to create a joint agreement to build understanding, commitment and capacity to achieve sustainable and low-emissions development.

Each of the working groups in the three districts where ParCiMon and LAMA-I are implemented were given the opportunity to present their work. The Low-emissions Development Initiative Working Group (IPRE WG) of Jayapura shared its experience in formulating eight strategic steps for land-based emissions reduction. The steps constitute land-based, low-emissions development aimed at enhancing the people's welfare and controlling emissions. The planned follow-up by the IPRE WG is to integrate their low-emissions development documents into the Jayapura Regional Medium-term Development Plan/Regional Government Work Plan (RPJMD/RKPD) and the RAD-GRK of Papua Province. Two mitigation actions that have already been incorporated into the regional plan are the rehabilitation of critical land and the replanting of sago forests.



inisiatif pembangunan rendah emisi berbasis lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengendalikan laju emisi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pokja IPRE adalah melakukan upaya integrasi dokumen pembangunan rendah emisi ke dalam dokumen RPJMD/RKPD Kabupaten Jayapura dan dokumen RAD-GRK Provinsi Papua. Dua aksi mitigasi yang sudah masuk kedalam perencanaan daerah dan akan diimplementasikan adalah rehabilitasi lahan kritis dan penanaman kembali hutan sagu.

Perwakilan masyarakat Desa Wambena dan Yepase Kabupaten Jayapura turut menyajikan berbagai pembelajaran yang di dapatkan melalui fasilitasi program ParCiMon dan LAMA-I di level kampung. Perwakilan Masyarakat memaparkan manfaat pemantauan jasa lingkungan bagi masyarakat salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan mendatang. Jenis pemantauan jasa lingkungan yang dilakukan mandiri oleh masyarakat meliputi pengukuran cadangan karbon, pengukuran potensi keanekaragaman hayati, dan pengukuran kualitas air.

Pokja Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi (Pokja P2E-PRE) Kabupaten Jayawijaya memaparkan 10 rencana strategis aksi penurunan emisi dari sektor penggunaan lahan yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Jayawijaya. Sepuluh usulan strategis pembangunan rendah emisi ini, jika dilaksanakan akan berkontribusi kepada penurunan tingkat emisi. Pokja P2E-PRE Kabupaten Jayawijaya untuk selanjutnya berupaya untuk mengarusutamakan pembangunan rendah emisi ke dalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan SKPD dan DPRD sekaligus terus meningkatkan kapasitas daerah dan mencari alternatif pendanaan baik dari pihak pemerintah daerah, provinsi dan sumber-sumber swasta lainnya.

Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja TIPRE) Kabupaten Merauke berbagi pengalaman mengenai proses pelaksanaan kedua program di kabupaten Merauke. Pokja TIPRE Kabupaten Merauke di sahkan melalui SK 411/2014, yang terdiri dari 25 institusi dengan sekretariat berada di Bappeda. Pembangunan rendah emisi penting bagi Merauke karena adanya perubahan lingkungan alam yang menyebabkan terjadinya bencana alam, perlunya partisipasi pada tingkat daerah untuk menanggulangi semakin meningkatnya perubahan lingkungan, dan aksi nyata di sektor berbasis

Representatives of the villages of Wambena and Yepase in Jayapura district also delivered a presentation of the lessons learned through ParCiMon and LAMA-I. The representatives also told of the benefits to the people of monitoring environmental services, such as raising awareness in the communities regarding the importance of preserving their environment for future generations. The monitoring that is carried out by the people includes measuring carbon reserves, biodiversity and hydrology.

The Low-emissions Development Monitoring and Evaluation Planning Working Group (P2E-PRE) of Jayawijaya presented their ten strategic steps to reduce emissions from land use. P2E-PRE has also begun the process of mainstreaming low-emissions development into the plans of the various regional governmental agencies and the regional parliament. It continues to enhance local capacity and search for funding, whether from the regional and provincial governments or private sources.

The Low-emissions Development Initiative Working Group (TIPRE) of Merauke shared their experience in implementing ParCiMon and LAMA-I. The TIPRE, which was formally established pursuant to Decree 411/2014, is made up of 25 institutions, with a





penggunaan lahan dengan mempertahankan kondisi lingkungan dan melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang kritis.

Setelah pemaparan hasil program ParCiMon dan LAMA-I di tiga kabupaten lokasi program, kabupaten Kepulauan Yapen mengungkapkan keinginan pemerintah daerah untuk memahami secara baik manfaat atau dampak dari pembangunan rendah emisi. Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan sangat mendukung kegiatan ini dan siap untuk langkah pertama, yaitu sosialisasi, selanjutnya membentuk Pokja dan kemudian menyusun program kegiatan. Kabupaten Biak Numfor juga menyatakan minatnya untuk turut serta dalam menyusun strategi pembangunan rendah emisi. Upaya ini diharapkan dapat memacu kesadaran dan semangat masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menurunkan emisi. Program penanaman sudah dilaksanakan tiap tahun, dan program rehabilitasi hutan lahan, termasuk upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

Melihat antusiasme yang ditunjukkan oleh kabupaten Biak Numfor dan Kepulauan Yapen, perwakilan dari Bappenas menyatakan bahwa untuk mencapai target penurunan gas emisi rumah kaca sebesar 26% tidaklah mudah. Upaya aktif dari seluruh pihak diperlukan untuk mencapai target tersebut salah satunya dengan pembuatan target setiap provinsi untuk membuat kegiatan RAD-GRK. Kegiatan publikasi dan komunikasi seperti lokakarya provinsi ini juga perlu dilakukan agar kabupaten yang menjadi percontohan dapat mengkomunikasikan pembelajaran untuk dapat di contoh kabupaten lainnya.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda Provinsi Papua juga mendukung aspirasi yang ditunjukkan kabupaten Biak Numfor dan Kepulauan Yapen, namun pemerintah provinsi Papua menghimbau adanya pengelolaan dan koordinasi antar seluruh pihak yang membantu dengan Bappeda, agar kegiatan dan sasaran dapat tercapai dengan baik.

Dengan terselenggaranya Lokakarya Provinsi Papua ini menandakan seluruh pihak telah berupaya bersama dalam merajut cita-cita bersama demi pembangunan hijau di Papua. Hasil yang didapatkan dari dua tahun pelaksanaan kegiatan ParCiMON dan LAMA-I walaupun belum sempurna namun terbentuknya cita-cita bersama, cukup menjadi momentum yang baik untuk membangun semangat optimis dalam membangun komitmen bersama baik dari kabupaten, provinsi dan nasional dalam mencapai pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di tanah air Indonesia.

secretariat located at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) office. Low-emissions development is important for Merauke owing to environmental changes that have caused natural disasters, the need for participation at the regional level to mitigate the increasing changes to the environment, and the actual actions needed to maintain the environment's condition and rehabilitate critical land.

Following these presentations, the representatives of the district government of Yapen Islands announced their intention to better understand low-emissions development. The representatives declared their firm support for low-emissions development and their readiness to take the first step, namely, dissemination of information followed by the formation of a working group and preparation of an activity plan. Biak Numfor district representatives also voiced their intention of participating in a low-emissions development strategy, hoping thereby to increase the community's awareness and commitment to safeguarding their environment and lowering emission. Planting programs can implemented on a yearly basis, as well as forest rehabilitation programs, including work aimed to conserve forest resources.

Witnessing the strong enthusiasm displayed by the Biak Numfor and Yapen Islands districts, the Bappenas delegates explained that to reduce greenhouse-gas emissions by the targeted 26% will not be easy. Active participation from all parties concerned was necessary to attain the target, such as setting targets for each province for preparing their RAD-GRK. Publications and communication, such as provincial workshops, were also needed in order for model districts to communicate their lessons learned for replication in other districts.

The representatives stressed the need for management and coordination to ensure that the activities are carried out effectively and the objectives achieved in a satisfactory manner.

The Papua Provincial Workshop signified that all parties have collaborated to realize their common aspiration for green development. The results from the two years of ParCiMON and LAMA-I, although not perfect, are sufficient to create a momentum in building a joint commitment—at the district, provincial or national levels—to achieve green economic development for the Republic of Indonesia.

*Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center*



# Jayawijaya: Membawa Indonesia Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau yang Lestari

## Jayawijaya: carrying Indonesia towards sustainable green development

photo: Rob Filadson/World Agroforestry Centre

**Upaya membangun Jayawijaya dengan konsep ekonomi hijau diawali dengan rencana aksi daerah yang mampu berkontribusi terhadap penurunan emisi sekaligus meningkatkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Papua.**

*The drive to develop Jayawijaya using the 'green economy' concept has been kick-started with a regional action plan to reduce greenhouse-gas emissions and preserve forests for the welfare of the people of Papua.*

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Kelompok kerja Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi (Pokja P2E-PRE) Kabupaten Jayawijaya telah menyusun sepuluh rencana aksi strategis penurunan emisi dari sektor penggunaan lahan, sebagai salah satu upaya untuk mendorong perencanaan penggunaan lahan yang mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya.

Hasil identifikasi kegiatan penurunan emisi Kabupaten Jayawijaya, dipaparkan dalam kegiatan konsultasi publik pada tanggal 16 Januari 2015, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Dokumen strategi penurunan emisi ini di konsultasikan kepada para pemangku kepentingan terkait termasuk perwakilan pemerintah nasional yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perwakilan pemerintah Provinsi Papua, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, lembaga non-profit, masyarakat kabupaten Jayawijaya, dan Duta Besar Uni Eropa.

Serangkaian proses identifikasi yang dilakukan oleh Pokja P2E-PRE ini terjadi melalui program *Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies* (ParCiMon), dan dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World

The Jayawijaya District Government through its Low Emission Development Planning, Monitoring and Evaluation (P2E-PRE) working group has prepared ten strategic action plans for reducing emissions from the land-use sector, promoting land-use planning that supports the realization of sustainable green development in the district.

The planned emission-reduction activities for Jayawijaya were presented at a public consultation held on 16 January 2015 at the District Development Planning Agency's (Bappeda) offices. The emissions-reduction strategy document was discussed by representatives from the national government (National Development Planning Agency (Bappenas)), Papua provincial government, local government departments (SKPD), non-governmental organizations, communities in Jayawijaya district, and the ambassador of the European Union.

The process undertaken by the P2E-PRE group was under the aegis of Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) and was implemented by a consortium consisting of the World Agroforestry Centre (ICRAF), Papua Low-Emission Development Task Force (PLCD-TF),





Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Gugus Tugas Pembangunan Rendah Karbon Papua (PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM), Yayasan Lingkungan Hidup (YALI Papua) dan Universitas Brawijaya dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa (*European Union*).

ParCiMon bertujuan untuk mendukung keberhasilan Papua dalam mencapai ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan kapasitas pemerintah daerah kabupaten dan mengembangkan perangkat yang dapat mendukung upaya untuk membangun aksi mitigasi yang efektif dan efisien sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan berbasis lahan.

Sepuluh rencana aksi penurunan emisi merupakan inisiatif awal yang berhasil disusun oleh Pokja P2E-PRE Kabupaten Jayawijaya dan menjadi momentum munculnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi hendaknya mempertimbangkan aspek ketersediaan dan keberlanjutan jasa lingkungan yang di sediakan oleh alam. Bentuk aksi penurunan emisi tersebut mengacu pada dua skenario utama yaitu kegiatan yang dapat mencegah penurunan cadangan karbon dan kegiatan yang dapat meningkatkan cadangan karbon.

Kegiatan mencegah penurunan cadangan karbon dilakukan dengan mempertahankan keberadaan penggunaan lahan dengan vegetasi rapat seperti hutan. Tiga kegiatan yang dapat dilakukan adalah: 1) mempertahankan keberadaan hutan primer dan sekunder sesuai fungsinya di Kawasan Lindung; 2)

Papua Community Conservation and Community Empowerment Foundation (YKPM), Papua Environmental Foundation (YALI Papua) and the University of Brawijaya, with financial support from the European Union.

The purpose of ParCiMon is to support Papua in achieving a sustainable, 'green' economy by building the capacity of the district government, developing methods and tools that can help build effective and efficient climate-change mitigation actions and promoting active participation by communities in the planning, monitoring and evaluation of land-based, sustainable, economic development.

The ten-step action plan to reduce emissions prepared by the Jayawijaya P2E-PRE group has provided momentum to raise awareness about economic development that can take into account the availability and sustainability of environmental services. The emissions-reduction actions refer to two key scenarios, namely, 1) activities that can prevent the lowering of carbon reserves; and 2) activities that can increase carbon reserves.

Preventing further reduction of carbon reserves focuses on maintaining dense vegetation canopy, such as forests. Three measures to achieve this are: 1) preserving primary and secondary forests in line with their function in Protected Areas; 2) preserving primary and secondary forests in line with their functions in community plantation areas; and 3) protecting the Lorentz National Park in line with its functions. The activities in this category have significant influence on maintaining carbon reserves.

mempertahankan keberadaan hutan primer dan sekunder sesuai fungsinya di areal perkebunan masyarakat; dan 3) melakukan perlindungan kawasan Taman Nasional Lorentz dengan mempertahankan luasan hutan primer dan sekunder sesuai fungsinya. Aktivitas dalam kategori ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mempertahankan cadangan karbon.

Adapun kegiatan peningkatan cadangan karbon berupa: pengembangan agroforestri kopi dan penanaman pohon kayu besi/sage (*Eusideroxylon zwagerii*) dan *kopercus* seluas masing-masing 15% dari lahan tidur di unit perencanaan hutan produksi konversi; mengembangkan agroforestri buah dan kopi dan melakukan penanaman pohon Kasuarina untuk menjadi hutan sekunder kerapatan rendah dari lahan tidur di unit perencanaan hutan rakyat; melakukan pengembangan agroforestri buah sebesar 10% dari lahan tidur di unit perencanaan Pertanian Lahan Kering Datar; mengembangkan agroforestri buah dan kopi seluas masing-masing 10% dari lahan tidur di unit perencanaan Pertanian Lahan Kering Lereng; dan melakukan reboisasi pada lahan kritis menjadi hutan sekunder kerapatan tinggi di Taman Nasional Lorentz.

Drs. Dady Permadi selaku Kepala Pokja P2E-PRE menerangkan 'bahwa pembangunan rendah emisi merupakan salah satu bagian dalam implementasi pembangunan yang berorientasi pada ekonomi hijau. Emisi yang ditimbulkan dari kegiatan

Activities to increase carbon reserves take the form of development of 1) coffee agroforestry, sage (*Eusideroxylon zwagerii*) and 'kopercus' on 15% of idle land in the planned conversion production forest; 2) fruit-and-coffee agroforestry and casuarina to become secondary forests with low canopy density on idle land in the planned community forests; 3) fruit or coffee agroforestry, each on 10% of idle land within the Dry Hillside Field Agricultural planning unit; and 4) reforestation of critical land to become secondary forests with high canopy density in the Lorentz National Park.

Drs Dady Permadi, chairperson of the P2E-PRE Working Group, explained that 'low-emissions development is a part of undertaking development oriented towards a green economy. The emissions created by development should be minimized. The preservation of natural resources that can synergize with the paradigm of sustainable development is the objective of low-emissions development. Given that reality, a coordinated activity is needed at the district level to promote the concept and facilitate various activities that lead to the achievement of low-emissions development in the district of Jayawijaya.'

The P2E-PRE Working Group intends to execute two primary measures, first, the mainstreaming of green economic development into the development plans of each local government department and the Regional House of Representatives (DPRD), thus, a number of mitigation actions can be implemented







pembangunan seharusnya dapat diminimalisasi. Terjaganya sumber daya alam yang dapat bersinergi dengan paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari pembangunan rendah emisi. Mengacu kepada kenyataan tersebut diperlukan sebuah aktivitas yang terkoordinasi pada tingkat kabupaten untuk mengembangkan pemikiran dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang mengarah pada tercapainya pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayawijaya'.

Selanjutnya, Pokja P2E-PRE kabupaten Jayawijaya berupaya menempuh dua langkah utama, yaitu dengan mengarusutamakan pembangunan ekonomi hijau kedalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga beberapa aksi mitigasi dapat di implementasikan secara swadana. Langkah kedua adalah dengan terus meningkatkan kapasitas daerah dan mencari peluang dukungan dari berbagai pihak.

Bentuk inisiatif yang dilakukan kabupaten Jayawijaya merupakan langkah nyata pengarusutamaan dan implementasi pembangunan ekonomi hijau yang dapat menjadi pendorong untuk gerakan penurunan emisi gas rumah kaca menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

through self-financing. The second measure is continuing enhancing local capacity and seeking opportunities to garner support.

The initiative taken by the Jayawijaya District constitutes a concrete step towards mainstreaming development that can be a driving force in lowering greenhouse-gas emissions and help create a sustainable economy in Papua Province.

*Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center*



# Seuntai Pesan dari Wambena dan Yepase untuk Dunia

## A message from Wambena and Yepase to the world

***Menyambut duta besar Uni Eropa di Kampung Wambena dan Yepase, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, warga kampung menitipkan pesan kepada Duta Besar Olof Skoog untuk disampaikan kepada dunia, bahwa air, udara segar, dan pepohonan di Kampung Wambena bukan hanya tanggung jawab rakyat Papua namun juga dunia. Saatnya dunia turut menjaga hutan di Papua untuk masa depan yang lebih baik.***

***In their greeting to the European Union ambassador, the villagers of Wambena and Yepase in Depapre District, Jayapura Regency, Papua Province, sent a message with Ambassador Olof Skoog to be passed to the rest of the world: that the water, fresh air and trees in Wambena and Yepase are not only the responsibility of the people of Papua but also the people of the world. It is time then for the world's governments to help preserve the forests of Papua for a better future.***

Kami masyarakat adat wilayah adat Yewena Distrik Depapre, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, yang telah menunjuk Kampung Wambena dan Yepase sebagai kampung percontohan Program ParCiMon. Ucapan dan rasa hormat pun kami tujukan kepada tim ParCiMon yang dengan sabar melatih dan mendampingi kami dalam satu wadah Kelompok Kerja Inisiatif Perencanaan Pembangunan Rendah emisi (IPRE) Kabupaten Jayapura.

Kami berupaya menjaga dan melestarikan hutan yang ada dengan menggunakan kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional. Kami masyarakat adat menjaga hutan ini agar kami dapat terus merasakan limpahan air jernih yang terus mengalir, nikmatnya udara segar, indahnya kicauan burung, tersedianya makanan dari hewan buruan, dan tumbuhan sebagai obat-obatan. Namun, ternyata pemikiran tadi merupakan kepentingan dalam lingkup kami yang sangat terbatas.

Kami masyarakat adat yang bermukim pada kampung-kampung dipinggiran kota terbukti mampu menjaga hutan. Namun kami mendengar perusahaan-perusahaan besar di Eropa, Amerika, Australia, di negara lainnya termasuk pemerintah Indonesia dan Jayapura, mereka menghasilkan emisi atau gas beracun dan mereka diberikan gaji. Siapa yang akan menggaji kami ketika kami menjaga hutan ini untuk terus ada untuk dunia?

We, the indigenous people of Yewena, Depapre, express our appreciation to the government of Jayapura District, which has selected Wambena and Yepase as the model hamlets for the Participatory Monitoring by Civil Society of Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) project. Our appreciation and respect also go to the ParCiMon team, who have patiently trained and assisted us in through the Low-emissions Development Planning Initiative Working Group in Jayapura District.

'We strive to safeguard and preserve the forests using our local wisdom and traditional knowledge of ecology. The people have conserved the forests so that we can always enjoy the clear water that continues to flow, the fresh air, the harmonious songs of the birds, the abundance of food provided by the forest animals, and the plants that give us our medicine. But all of these are our interests within our limited environment.

'We, the indigenous tribes who live in hamlets at the outer edges of cities, have been proven to be able to preserve the forests. But we hear of large companies from Europe, United States, Australia and other countries, including the Indonesian and Jayapura governments themselves, that produce emissions or toxic gasses and who are paid salaries to do so. Who pays us for constantly conserving the forests for the world?





photo: Rob Finlayson/World Agroforestry Centre

Berbicara tentang perencanaan pembangunan rendah emisi, sebagai masyarakat adat, kami memiliki beberapa perencanaan penggunaan jasa lingkungan dengan meningkatkan kapasitas daya makro hidro sehingga lampu yang kami gunakan saat ini dapat menyala dengan baik dan mungkin dapat digunakan oleh kampung lain. Kami juga ingin mampu mengelola sumber air yang melimpah agar tidak terbuang ke laut. Kami juga ingin mampu melakukan penghijauan untuk lahan yang kini ditumbuhi ilalang. Dan kami juga ingin agar pengetahuan ekologi tradisional dapat diajarkan di sekolah.

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mohon bantu kami menjawab pertanyaan:

*"Siapa yang dapat membantu kami agar sumber air yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghasilkan pendapatan bagi kampung? Siapa yang dapat mendampingi kami dalam upaya kami menjaga hutan di sekitar kami? Adakah bantuan yang bisa diberikan baik berupa pendanaan maupun kelembagaan yang dapat membantu kami melestarikan hutan dan menjaga fungsi yang terkandung di dalamnya?"*

Kami sebagai masyarakat adat merasa program ParCiMon yang telah berjalan selama dua tahun ini bermanfaat untuk kami dan dapat dilakukan di kampung lain. Namun kiranya kami berpesan apabila ParCiMon akan dilakukan di kampung lain hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti: hasil yang di berikan dari ParCiMon dapat dikembangkan

'On the subject of low-emissions development plans, we, as indigenous people, have a number of plans for using the services provided by our environment: by increasing micro-hydropower capacity so that the lamps we use will continue to shine and may even be used by other hamlets; we also want to manage our abundant water so that it does not merely flow to the sea; we also want to replant our fields that are now full of weeds; and we also want our traditional ecological knowledge to be taught in schools.

'But, to achieve all these, please help us answer these questions:

*'Who can help us ensure that our abundant water sources can be well used and generate income for our hamlets? Who can assist us in our efforts to conserve the forests around us? Can the assistance be in the form of funding or is there any institution that can help us preserve the forests and its functions?'*

'We, the indigenous people, feel that ParCiMon for the last two years has been very beneficial for us and can be implemented also in other hamlets. But we need to say that if ParCiMon is to be carried out in other hamlets, the following should be considered: the outcomes produced by ParCiMon should be able to be developed and enjoyed by the people of Wambena and Yepase. The government should enact local regulations on low-emissions land-use plans and provide budget to support the ParCiMon program. We also hope that the European Union and other donors in the future provide other programs



photo: Robi Firdausy, World Agroforestry Centre

dan dinikmati oleh masyarakat kampung Wambena dan Yepase. Pemerintah perlu membuat peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan lahan yang rendah emisi sekaligus menyediakan anggaran untuk mendukung program ParCiMon. Kami juga berharap untuk ke depannya lembaga donor dapat memberikan program yang lebih implementatif dan bersentuhan dengan ekonomi masyarakat.

Kami sebagai masyarakat adat akan terus menjaga hutan menggunakan pengetahuan ekologi tradisional atau kearifan lokal karena hutan adalah bagian dari adat istiadat. Namun untuk mendukung kami agar dapat terus menjaga hutan, kami memerlukan dukungan dana dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat adat dari pemerintah kabupaten Jayapura, lembaga penelitian, LSM, negara yang peduli terhadap pelestarian hutan termasuk negara-negara Uni Eropa. Banyak hal yang mampu kita lakukan secara bersama-sama jika kerja sama ini diperpanjang dan ditingkatkan.

Kepada duta besar Uni Eropa kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengunjungi kami. Kami berharap salinan teks sambutan masyarakat adat dapat diberikan kepada negara-negara di benua Eropa, agar negara-negara di benua Eropa lebih giat mendukung program ParCiMon di kabupaten Jayapura dan ditempat lain di Papua.

*Kami masyarakat adat yakin:  
Barang siapa yang bekerja dengan jujur di atas tanah ini, akan mendapat tanda heran, yang satu ke tanda heran yang lain.  
Salam masyarakat adat untuk pelestarian lingkungan dan penurunan rendah emisi.  
Terima kasih*

**Yehuda Demetouw**  
**Ketua Dewan Adat Yewena**



photo: Yessi Dewi Agustina, World Agroforestry Centre

that are easily able to be implemented and which improve the people's economy.

'We, the indigenous people, will keep on preserving the forests using our traditional ecological knowledge and local wisdom because the forest is part of our custom. But to keep on safeguarding the forests, we need funding and capacity building for our hamlets from the government of Jayapura, research institutions, NGOs and countries that are concerned with forest preservation, including the European Union countries. There are many things that we can achieve together if this collaboration can be extended and enhanced.

'To the ambassador of the European Union, we express our gratitude for your visit. We hope these welcoming words from the people can be passed on to the countries of the European continent so that they continue to show interest in supporting ParCiMon in Jayapura District and other places in Papua Province.

*'We, the indigenous people, believe that anyone who does honest work on this land will receive gratitude.  
'Our hope is for the successful preservation of the environment and lowering of emissions.'*

**Mr Yehuda Demetouw**  
**Chairperson**  
**Yewena Indigenous People's Council**

*Edited by Yessi Dewi Agustina*



# Negara Denmark Turut Serta Menjaga Hutan di Papua

Denmark helps mitigate climate change  
in Papua



photo: Vessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre





**Pemerintah Denmark mendukung Indonesia dalam memperlambat laju perubahan iklim Dunia melalui pendekatan tata guna lahan yang baik dan menjaga keberlangsungan penyediaan jasa lingkungan**

*The Danish government supports Indonesia in slowing the rate of global climate change through good land management and maintaining the sustainability of environmental-service providers.*

Dukungan pemerintah Denmark kepada pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan gas emisi rumah kaca merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global, namun juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat Indonesia, seperti contohnya turut menjaga keberlangsungan jasa lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan.

Program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) yang digiatkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan the Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific (CCROM) merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Denmark melalui the Danish International Development Agency (DANIDA).

Program LAMA-I yang diluncurkan pada bulan Juli 2013 menitikberatkan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan. Lokasi program LAMA-I berlangsung di dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dan tiga kabupaten di Provinsi Papua yaitu Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Memasuki kegiatan LAMA-I di tahun kedua, DANIDA sebagai donor program melakukan kunjungan ke dua kabupaten di Papua yaitu Jayapura dan Merauke untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan kegiatan aksi mitigasi lokal, terutama dengan pemerintah daerah sebagai pemeran penting dalam penyusunan dan implementasi strategi pembangunan rendah emisi.

Perwakilan DANIDA dari *Environmental Support Program* (ESP3) Lars Moller berdiskusi dengan para *stakeholder* terkait untuk melihat secara langsung pencapaian kegiatan LAMA-I di dua tahun pertama sekaligus mendapatkan informasi, masukan dan pengalaman dari

The support of the Danish government to Indonesia in reducing greenhouse-gas emissions is not only to save the planet from warming but also to provide other benefits for the Indonesian people, such as maintaining the sustainability of environmental-service providers.

The Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) project, which is implemented by the World Agroforestry Centre (ICRAF) in association with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and the Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific (CCROM), is one of the contributions of the Danish government, through the Danish International Development Agency (DANIDA).

LAMA-I, which was launched in July 2013, emphasizes strengthening local government capacity in planning low-emissions development in the land-based sector. LAMA-I is active in six districts in two provinces: South Sumatra (Musi Rawas, Musi Banyuasin and Banyuasin districts) and Papua (Jayapura, Jayawijaya and Merauke districts).

Entering the second year of LAMA-I's activities, representatives of DANIDA visited two districts in Papua—Jayapura and Merauke—to interact with people involved in local mitigation, especially the regional government, whose important role is to design a low-emissions development strategy.

Mr Lars Moller, from the Environmental Support Program (ESP3) of DANIDA, observed what had been achieved by LAMA-I in its first year, discussing activities with stakeholders to obtain feedback and their experience of the project's



pemangku kepentingan terkait untuk menyusun strategi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Pada pertemuannya dengan jajaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, Moller mengatakan bahwa, “melindungi hutan, tidak hanya menguntungkan dengan memperlambat laju perubahan iklim, tetapi juga memungkinkan peningkatan manfaat ekonomis dari hutan. Oleh karena itu, menangani permasalahan perlindungan hutan, harus membawa dua pesan utama yaitu mengurangi laju perubahan iklim dan peningkatan mata pencaharian”.

Diskusi interaktif antara tim LAMA-I dan pihak BPLH Provinsi Papua juga sekaligus memperkenalkan Sistem Informasi untuk Pembangunan Sumberdaya Lahan secara Berkelanjutan (*Information System for Sustainable Land Development/ INSTANT*). Sistem informasi ini adalah suatu bentuk pengolahan data terpadu dalam rangka menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu proses pembangunan sumberdaya lahan secara berkelanjutan.

Perwakilan dari DANIDA turut berbincang dengan anggota Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE) Kabupaten Jayapura beserta jajaran Bappeda Kabupaten Jayapura, mengenai manfaat pengelolaan lahan yang lestari khususnya manfaat jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Papua dan Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi model perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan jasa lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan, yang dapat menginspirasi provinsi atau kabupaten lain di Indonesia.

Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program LAMA-I di Kabupaten Jayapura. Jayapura mendapatkan kehormatan karena dapat bekerjasama dan mendapatkan dukungan dari DANIDA dalam pengelolaan data, informasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan dukungan

activities as part of planning the implementation strategy for next year's work.

‘Slowing the rate of climate change is not the only benefit from preserving forests; preservation also fosters an increase of economic benefits from forests. Therefore, solving the problem of mitigation through forests needs to carry two main messages: slowing the climate-change rate and improving livelihoods’, Mr Moller said at a meeting with staff of the Papua Environment Management Agency.

The Information System for Sustainable Land Development (INSTANT) was also introduced in the discussion between the LAMA-I team and the Papua Environment Management Agency. INSTANT is a form of integrated data-processing that provides basic information for decision-making in the sustainable land-resources development process.

The DANIDA representative also held a discussion with the Low-emissions Development Initiative Working Group (IPRE) of Jayapura District regarding the benefits of sustainable land management, in particular the environmental benefits for the community. Papua and South Sumatra are expected to become role models for land-use planning that takes environmental benefits into consideration for sustainable development, which can inspire other provinces and districts in Indonesia.

Mr Hana Hikoyabi, head of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in Jayapura, stated his support for LAMA-I. ‘Jayapura is honoured by the cooperation and support for sustainable management of data,

penuh pada LAMA-I dan berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan manfaat untuk aksi pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan dan ditambah dengan sistem informasi untuk pengelolaan sumber daya lahan yang baik untuk Kabupaten Jayapura. Berkat LAMA-I, Pokja Kabupaten Jayapura mendapatkan catatan yang baik dari pemerintah Provinsi Papua.

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya tetap melakukan pembangunan demi ekonomi masyarakat namun tetap berwawasan lingkungan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia tak terkecuali pemerintah Kabupaten Jayapura. Melalui penelitian yang dilakukan LAMA-I pemerintah memiliki perangkat yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi apa yang diperoleh jika pembangunan yang dilakukan dan dampak yang di alami dari penurunan keanekaragaman hayati, fungsi ekologi, daerah aliran sungai dan jasa lingkungan lainnya.

Dalam upaya melakukan pembangunan rendah emisi, pemerintah Kabupaten Merauke turut mendukung program LAMA-I di Kabupaten Merauke, di tandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di antara ICRAF dengan pemerintah Kabupaten Merauke pada tanggal 12 Maret 2015 yang disaksikan oleh seluruh pihak terkait termasuk perwakilan DANIDA. Pemilihan Merauke sebagai lokasi kegiatan LAMA-I dikarenakan Merauke merupakan wilayah strategis bagi pertumbuhan pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan populasi secara signifikan akibat faktor alami dan migrasi, kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lahan, investasi skala besar dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan sebuah bukti komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dengan program LAMA-I yang menjadi sebuah awal dalam mewujudkan sinergi dan integrasi antara mitigasi perubahan iklim dan rencana pembangunan daerah. Sekretaris daerah Kabupaten Merauke, Daniel Pauta menekankan bahwa, "Pemerintah daerah Merauke menyambut baik program tersebut, tidak hanya konservasi hutan saja, namun perlu dilakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ini adalah awal dari rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan bersama-sama dan semoga mempunyai manfaat bagi semua pihak. Pemerintah Kabupaten Merauke menghimbau berbagai pihak terkait untuk melakukan kegiatan ini secara bersungguh-sungguh".

information and the environment given by DANIDA. Jayapura regional government gives full support to LAMA-I and hopes that it will produce benefits from sustainable land management; plus a good information system for land-resource management in Jayapura District. The Working Group has earned a good reputation with the regional government of Papua Province thanks to LAMA-I'.

Providing an understanding of the importance of development that is environmentally sound for the sake of the people's economy is a huge challenge for the governments of Indonesia and Jayapura District is no exception. The research done by LAMA-I equips the district with methods and tools that help decision-making by taking into account the economic benefits that can be gained from development and the impact of the decline of biodiversity, ecological functions, river-basin health and other environmental services.

A memorandum of understanding between the government of Merauke District and ICRAF was signed on 12 March 2015, witnessed by all parties involved, including the DANIDA representative, as a strong sign of local government support for LAMA-I. The selection of Merauke as a location for LAMA-I activity was based on the significant population growth owing to natural factors and migration, land- and natural resources-based development, large-scale investment and other economic activities.

The signing of the memorandum is a proof of commitment between the district government and LAMA-I and was the beginning of the actualization of synergy between climate-change mitigation and the regional development plan. 'The government of Merauke welcomes the project. Forest conservation is not the only thing that must be done but also sustainable forest management', stressed the regional secretary of Merauke District, Daniel Paut. 'This is the beginning of an action plan that will be created together and hopefully will be beneficial for all of us. The district government urges all related parties to work with the project wholeheartedly'.

*Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center*



# Tiga Kabupaten Bersama-sama Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan

Three districts working together for green economic development in South Sumatra

*Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Musi Rawas serempak menggelar konsultasi publik strategi pembangunan rendah emisi menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.*

*The districts of Banyuasin, Musi Banyuasin and Musi Rawas held public consultations on low-emissions development strategies for sustainable economic development in South Sumatra.*



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pembangunan rendah emisi menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Inisiatif tersebut di tuangkan dalam Peraturan Gubernur no. 34 tahun 2012 tentang rencana pembangunan rendah emisi di Sumatera Selatan. Berangkat dari legitimasi Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca tersebut, pemerintah daerah masih perlu melakukan integrasi rencana aksi mitigasi ke dalam rencana pembangunan sampai pada tahap implementasi, termasuk di dalam pembelajaran secara inklusif di tingkat kabupaten.

Melalui Program *Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia* (LAMA-I), Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas (Pokja PTGL-EHKB) Kabupaten Banyuasin, Pokja PTGL-EHKB Musi Banyuasin dan Pokja REDD+ Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengidentifikasi aksi mitigasi lokal yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing kabupaten. Guna memaparkan skenario aksi mitigasi yang telah disusun oleh Pokja dan mendapatkan masukan, sekaligus membangun kesepahaman dari para pihak di masing-masing kabupaten terhadap rencana implementasi aksi penurunan emisi, maka ketiga Pokja di tiga kabupaten menggelar Konsultasi Publik.

Konsultasi Publik pertama diselenggarakan di Aula Bupati Kabupaten Banyuasin pada tanggal 21 April 2015. Bupati Banyuasin Bapak Yan Anton Ferdian SH pada sambutannya menyatakan bahwa, keluaran yang didapatkan harus dapat membantu program perencanaan pembangunan di setiap SKPD pada tahun 2016. Melalui kegiatan ini juga dapat dikembangkan strategi untuk mencapai pembangunan yang menyejahterakan masyarakat namun kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dan diharapkan dapat menjadi program kerja di tahun 2017.

The South Sumatra provincial government has taken the lead in creating low-emissions development strategies for a sustainable economy, incorporating the directive into Governor's Regulation no. 34 of 2012 on low-emissions development in South Sumatra.

Following the formalization of the Regional Action Plan to lower greenhouse-gas emissions, the government still needs to integrate the mitigation action plan into development plans up to the implementation phases, including into the inclusive learning process at district level.

Through the Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) project, the Working Group for Land-use Planning to Support a Green Economy and Biodiversity Conservation (PTGL-EHKB) in Banyuasin, the Musi Banyuasin PTGL-EHKB Working Group, and the Musi Rawas REDD+ Working Group have identified mitigation actions that have the potential to reduce greenhouse-gas emissions in each of the districts.

In order to present the scenarios for the different actions, garner feedback and build a collective understanding in each district on implementation, the three working groups organized a series of public consultations.

The first consultation was held in the offices of the head (bupati) of Banyuasin District on 21 April 2015. The bupati, Mr Yan Anton Ferdian SH, in his welcoming remarks stated that the outputs must help development planning programs in each department for 2016. The consultation should also be able to identify a strategy for development that improves the welfare of the people while at the same time preserving the environment. The strategy is expected to be adopted in the government's 2017 work program.

The Banyuasin District PTGL-EHKB Working Group presented 13 land-use development strategies to



Pokja PTGL-EHKB Kabupaten Banyuasin memaparkan 13 strategi pembangunan tata guna lahan untuk mendukung ekonomi hijau di Kabupaten Banyuasin dihadapan peserta konsultasi publik yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti, Bappeda Prov. Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan, Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Selatan, BPKH Wilayah II Palembang, instansi-insatansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin lainnya, perguruan tinggi/akademisi, LSM/proyek donor dan sektor swasta.

Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin selaku ketua Tim Pokja PTGL-EHKB Kabupaten Banyuasin Bapak Idrus Zulkifli memaparkan hasil perhitungan sementara dari tingkat emisi acuan atau *Reference Emission Level* di Kabupaten Banyuasin. Dari 13 Aksi Mitigasi Kabupaten Banyuasin terdapat empat aksi terpilih yang nantinya akan menjadi prioritas dalam penyusunan rancangan pembangunan di Banyuasin. Aksi pertama adalah mempertahankan tutupan lahan yang ada di area gambut, agroforestry di lahan terbuka, dan melakukan perlindungan terhadap kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta rehabilitasi lahan kritis. Konsultasi Publik kedua diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 April 2015. Pokja PTGL-EHKB Kabupaten Musi Banyuasin memaparkan 10 rencana aksi mitigasi dalam upaya menurunkan emisi di Kabupaten Musi Banyuasin kepada para pemangku kepentingan terkait tata guna lahan di Kabupaten Banyuasin dan *stakeholder* lainnya seperti kalangan NGO/LSM lokal, pemerhati lingkungan, akademisi dan masyarakat.

Bertempat di aula Hotel Ranggonang Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Asisten II Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Ir. H. Sulaiman Zakaria, MT pada sambutannya mengungkapkan bahwa, "Kedepannya diharapkan agar DPRD Musi Banyuasin dan pihak investor untuk bekerja sama dalam memperbaiki lingkungan. Melalui program LAMA-I ini kita dapat mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah, dalam melakukan

support a green economy in the district before an audience consisting of representatives of provincial government agencies, such as the South Sumatra Development Planning Agency (Bappeda), Forestry Office, Environmental Agency, Palembang Area 2 BPKH and other agencies of the Banyuasin District Government, as well as universities, NGOs, donors and the private sector.

The head of the Banyuasin District Bappeda, who is the chairperson of the Banyuasin PTGL-EHKB Working Group, Mr Idrus Zulkifli, presented an interim estimate of the Reference Emission Level for the district. Of the 13 mitigation actions, four were selected to become priorities in development planning in the district. The first of such actions is maintaining tree cover in peat areas, agroforestry in open fields, preservation of conservation and protected areas, and rehabilitation of critical land.

The second public consultation took place in Musi Banyuasin District on 30 April 2015. The district's PTGL-EHKB Working Group presented their ten mitigation action plan for the district to people involved in land use and others, such as local NGOs, environmental observers, academics and the community.

In the meeting hall of Ranggonang Sekayu Hotel, Musi Banyuasin, the Second Assistant to the Government of Musi Banyuasin, Mr Ir H. Sulaiman Zakaria MT, in his welcoming remarks stated that 'it is expected that the Musi Banyuasin House of Representatives and investors will work together to rehabilitate the environment. Through LAMA-I, we can support institutional capacity building for the government in mapping the issues faced by a number of government institutions with the aim of reducing carbon-emission levels and analyzing the use of land and its impact on carbon emissions and environmental services'.

The mitigation action plans that have been prepared by the Musi Banyuasin PTGL-EHKB Working Group are





pemetaan permasalahan di sejumlah institusi pemerintah daerah dalam upaya penurunan tingkat emisi karbon dan menganalisa penggunaan lahan serta dampaknya terhadap emisi karbon dan jasa lingkungan’.

Rencana aksi mitigasi yang telah di susun oleh Pokja PTGL-EHKB Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk mempengaruhi tata guna lahan di Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat mempertahankan fungsi lingkungan, fungsi air, dan fungsi keanekaragaman hayati, dengan tetap mempertimbangkan proses pembangunan yang membutuhkan perubahan penggunaan lahan, sehingga pembangunan yang terencana dan sesuai dengan fungsinya berdasarkan unit perencanaan dapat terlaksana.

Pokja REDD+ Kabupaten Musi Rawas menjadi Pokja Ketiga yang menyelenggarakan Konsultasi Publik yang membahas mengenai 17 (tujuh belas) aksi mitigasi yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Musi Rawas. Bertempat di Hotel Hakmaz Taba Lubuk Linggau pada tanggal 6 Mei 2015. Bupati Musi Rawas, Bapak H. Ridwan Mukti menyampaikan dalam sambutannya, “Hutan di Musi Rawas sangat luas dan berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, namun selama ini pembangunan pemerintah tidak pernah sejalan antara pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan pembangunan tata ruang untuk keseimbangan lingkungan, melalui program LAMA-I ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam penerapan kedua perencanaan teknis tersebut”.

Skenario tata guna lahan yang diusulkan dalam dua kelompok aksi mitigasi dengan dua target lokasi yaitu aksi mitigasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan, dan aksi mitigasi yang dilakukan di luar kawasan hutan ini merupakan rencana penggunaan lahan yang didasarkan pada sumber-sumber penyebab emisi yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas, kelayakan fungsi, sinergitas kegiatan perencanaan dalam menunjang kegiatan pembangunan berkelanjutan, namun demikian perlu masukan dari pemangku kepentingan yang lain untuk melihat faktor ekonomi, sosial dan budaya, serta aspek ekologis secara lebih luas.

Misi besar pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 “Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana” telah sejalan dengan upaya yang dilakukan LAMA-I di tiga Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Dukungan penting dalam proses inisiatif ini datang dari berbagai pihak terkait. Pengembangan kapasitas yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan upaya mitigasi yang disertai dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah, untuk menuju pembangunan ekonomi hijau dengan sumber daya alam yang tetap lestari dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

intended to affect land use in the district with the aim of maintaining environmental functions, water functions and biodiversity while still taking into account the development process that requires changes in land use, thus, allowing for planned development that is in line with its functions based on the planning unit.

The Musi Rawas REDD+ Working Group was the third to hold a public consultation, discussing 17 mitigation actions that can be implemented in the district. At the Hakmaz Taba Lubuk Linggau on 6 May 2015, the bupati of Musi Rawas, Mr H. Ridwan Mukti, in his welcoming speech explained to the audience that, ‘the Musi Rawas forest is a very sizable area and has the potential to reduce greenhouse-gas emissions. However, so far development activities undertaken by the government have not balanced the medium-term development plan with land-use development that maintains ecology. Through LAMA-I it is hoped that the best solution can be achieved in the implementation of both technical plans’.

The land-use scenarios proposed by the two mitigation groups in two target locations—namely, mitigation actions undertaken in forest areas, and mitigation actions undertaken outside forest areas—constitute a land-use plan that is based on emission sources in Musi Rawas District, functional feasibility, and synergy of planning to support sustainable development. However, input from other stakeholders needs to be gathered in order to consider economic, social and cultural factors as well as the ecological aspects.

The overall mission of the development being undertaken in the South Sumatra Province for 2013–2018—‘environmental management and disaster mitigation’—is in line with the work of LAMA-I in Banyuasin, Musi Banyuasin and Musi Rawas. The most important support to this initiative comes from a multitude of groups. Capacity development is hoped to improve mitigation actions accompanied by policy support from the local government towards green development with conserved natural resources that bring optimal benefits to the community. *(Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center)*

# Pokja Pembangunan Rendah Emisi: Kontributor Pembangunan Ekonomi Hijau Di Papua dan Sumatera Selatan

**Low-emissions development working groups:  
contributors to green economic development  
in Papua and South Sumatra**

***Enam Kelompok Kerja (Pokja) berdialog bersama untuk membangun kesepakatan sekaligus menjawab tantangan untuk mencapai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan rendah emisi di Papua dan Sumatera Selatan.***

***Six working groups held a joint dialogue to build understanding and address challenges in acquiring the commitment of local governments in support of low-emissions development planning in Papua and South Sumatra provinces.***

Pokja pembangunan rendah emisi merupakan kolaborasi yang unik dan dibentuk dalam upaya memperkuat kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan daerah dalam menyusun rencana aksi mitigasi dan menjadi pelopor dalam mendesiminasi pentingnya proses perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab menuju pembangunan rendah emisi di Provinsi Papua dan Sumatera Selatan. Pokja beranggotakan unsur SKPD terkait di tingkat Kabupaten, Lembaga swadaya Masyarakat lokal, kalangan akademisi, dan perwakilan masyarakat. Pokja secara umum berupaya untuk dapat membangun pemahaman tentang pembangunan rendah emisi dalam proses pembangunan di kabupaten dengan melakukan fasilitasi terhadap semua pihak terkait dalam proses penyusunan inisiatif pembangunan rendah emisi untuk sektor berbasis lahan di tingkat kabupaten secara integratif, inklusif dan berdasarkan data dan informasi yang valid.

Enam pokja pembangunan rendah emisi yaitu Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE) Kabupaten Jayapura, Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (TIPRE) Kabupaten Merauke, Pokja Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi (P2E-PRE),

Low-emissions development working groups represent unique collaborations. They were established to enhance the capacity of regional governments and others in formulating mitigation action plans. They are pioneers in promoting the importance of responsible development towards a low-emissions economy in the provinces of Papua and South Sumatra.

The groups are made up of district-level government departments, local non-governmental organizations, academics and community members. The groups aim to build understanding about low-emissions development in the context of district development by providing facilitation to all parties involved in the formulating initiatives for the land-based sector. They adopt an integrated and inclusive approach based on accurate information.

Six low-emissions development working groups have already been formed in several districts: Low-Emissions Development Initiative, Jayapura; Low-Emissions Development Initiative Technical, Merauke; Low-Emissions Development Planning, Monitoring and Evaluation, Jayapura; Land-use Planning to Support a Green Economy and Biodiversity Conservation (PTGL-EHKB), Banyuasin;

Pokja Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas (PTGL-EHKB) Kabupaten Banyuasin, Pokja PTGL-EHKB Kabupaten Musi Banyuasin dan Pokja REDD+ Kabupaten Musi Rawas merupakan beberapa contoh Pokja yang dibentuk oleh daerah sebagai upaya nyata kabupaten untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam proses pembentukannya pemerintah kabupaten bekerjasama dengan program *Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia* (LAMA-I).

Pokja di enam kabupaten tersebut, melalui serangkaian kegiatan penguatan kapasitas baik secara teknis maupun kelembagaan dan pengembangan metodologi telah membuahkan hasil yaitu teridentifikasinya skenario rencana aksi mitigasi yang dapat diimplementasikan di kabupaten masing-masing. Namun, pemerintah daerah tetap memegang peranan agar aksi mitigasi daerah yang telah disusun dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga, Pokja harus mampu memfasilitasi dan mengawal proses rekomendasi pembangunan rendah emisi tersebut.

Dalam upaya mempersiapkan serta memfasilitasi Pokja untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul juga untuk menyempurnakan proses yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai momentum pembelajaran untuk perencanaan kegiatan selanjutnya, LAMA-I bersama mitra pelaksana menyelenggarakan acara Lokakarya Pembelajaran Lintas Kabupaten di Belitong pada tanggal 11-15 Mei 2015.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan Pokja enam kabupaten lokasi program LAMA-I. Pembelajaran yang disebarkan ke masing-masing kabupaten diharapkan dapat mendukung proses penyusunan *draft* dokumen aksi mitigasi yang sudah disinergikan dengan rencana pembangunan kabupaten dan diulas bersama-sama dengan tenaga ahli dari tim LAMA-I. Lintas pembelajaran ini juga diharapkan menunjang proses terwujudnya kesepahaman dan konsensus bersama tim teknis Pokja dan pejabat kunci di tingkat kabupaten, sehingga proses integrasi aksi mitigasi ke dalam rencana pembangunan daerah dapat terimplementasi dengan baik.

Lokakarya Pembelajaran Lintas Kabupaten diawali dengan sesi *Cross Learning*, sesi ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dari pembelajaran dan presentasi yang dicapai oleh masing-masing Pokja. Pada sesi ini anggota masing-masing Pokja menceritakan lima cerita sukses yang dialami selama implementasi program LAMA-I, sekaligus memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sekaligus potensi apa yang dapat mendukung proses peningkatan kapasitas Pokja. Sesi selanjutnya cukup menarik di rasakan oleh anggota Pokja masing-masing kabupaten adalah ketika



PTGL-EHKB Musi Banyuasin; and REDD+, Musi Rawas. In the processing of forming these working groups, the district governments collaborated with the Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) project.

The work done by the groups in the six districts—a series of capacity-building activities of a technical and institutional nature along with methodology development—have identified mitigation actions that can be implemented in their respective districts. The local governments play a critical role in integrating the planned local mitigation actions into the regional development plans. As such, the working groups also need to facilitate the recommendation processes of their low-emissions development plans.

To help the groups, improve the process and build on the work to date in the next phase of planning, LAMA-I held a District Cross-Learning Workshop in Belitong, 11-15 May 2015. The workshop was attended by representatives of the groups in the districts where the LAMA-I project is located. The lessons learned by each the district group will support the drafting of mitigation action documents that are aligned with district development plans. The cross-learning is also expected to support the creation of a consensus among the working groups' technical teams and key government officials thus ensuring effective integration of the mitigation actions into local development plans.

The workshop began with sharing the lessons learned, as well as the achievements, of each group. During the session, members recounted five success stories from the LAMA-I project, mapped their strengths and weaknesses and identified support for further building their capacity. In the next session, members were asked to share





mereka bersama-sama menuangkan mimpi yang ingin di wujudkan baik dari Program LAMA-I maupun pengembangan Pokja. Di sesi ini juga masing-masing Pokja menceritakan hal yang paling membanggakan selama implementasi program LAMA-I dengan elemen apa yang dibutuhkan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Hampir seluruh Pokja memimpin untuk terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dengan lingkungan yang tetap lestari.

Tim ICRAF memberikan sesi *technical assistance* dalam upaya agar masing-masing Pokja dapat menyempurnakan dokumen strategi mitigasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan kembali tipologi aksi yang akan dilaksanakan, kesenjangan yang ada, analisa efektifitas biaya, tingkat prioritas dan ketersediaan sumber dana yang dapat mendukung implementasi dari rencana aksi yang telah disusun. Pendekatan *Driver, Pressure, State, Impact dan Respond* digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul mengenai aksi mitigasi yang sudah disusun. Sesi *Technical Assistance dan Policy Dialogue* yang dibawa oleh tim CCROM IPB membekali tim teknis Pokja untuk melakukan mediasi dengan pejabat daerah untuk membangun kesepahaman terhadap aksi mitigasi yang diusulkan untuk mencapai komitmen bersama terhadap terlaksananya aksi mitigasi di masing-masing kabupaten.

Berbagai kegiatan dalam bentuk permainan dalam sesi *team building* adalah merupakan kegiatan yang cukup dinikmati oleh Pokja dalam lokakarya ini. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Pokja menggambarkan bentuk kerja sama dan pola kepemimpinan yang dimiliki masing-masing Pokja. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persahabatan di antara sesama anggota Pokja.

Lokakarya lintas pembelajaran ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas Pokja melalui proses pertukaran informasi dan pembelajaran, kegiatan ini juga bermanfaat dalam menunjang proses percepatan penyusunan strategi aksi mitigasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria untuk menyempurnakan strategi aksi mitigasi. Strategi mitigasi yang dapat di implementasikan di Papua dan Sumatera merupakan pencapaian Pokja dan seluruh *stakeholder* terkait menuju pembangunan ekonomi hijau sekaligus berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca nasional.

their aspirations about development of the working group and the project's objectives. They described their proudest achievements and the steps needed to realize them. Almost all the groups are envisioning development that renders maximum benefits to the community while preserving the environment.

The ICRAF team delivered a technical session to help the groups refine their mitigation strategies in a comprehensive manner by reconsidering the typology of the actions to be taken, any gaps, cost-effectiveness analyses, priority levels and availability of funding. The 'Driver, Pressure, State, Impact and Respond' approach was used to answer questions regarding the actions. The Technical Assistance and Policy Dialogue session facilitated by the CCROM IPB team briefed the technical teams on methods to conduct mediation with local officials in order to build understanding of the proposed mitigation action for their easier implementation.

A number of activities in the form of games and team-building exercises were among the activities most enthusiastically enjoyed by the group members during the workshop. Activities that involved all working groups' members demonstrated the collaboration and leadership methods of each of the groups. Such activities are also expected to enhance communication and solidarity.

The workshop was useful not only in building the capacity of the groups' members through information and knowledge sharing but also in accelerating the formulation of mitigation strategies. Implementation of the strategies in Papua and Sumatra will be the fruit of the work of the groups. (Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center)



# Biografi Ketua Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayapura

**Chairperson of the Jayapura District Low-Emissions Development Initiative Working Group**

Artikel kali ini akan membahas Profil Ketua Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE), Yos Levi Yoku, S.Pt. Beliau adalah sosok di balik keberhasilan Pokja IPRE yang tercatat sebagai Pokja pertama yang dibentuk di Provinsi Papua sekaligus mendapat catatan baik dari Pemerintah Provinsi Papua atas keberhasilannya dalam menyusun aksi mitigasi lokal untuk mendukung pembangunan rendah emisid di Kabupaten Jayapura.

Yos Levi Yoku atau yang lebih akrab di panggil Bu Yos adalah perempuan kelahiran Jayapura 48 tahun silam. Mengenyam pendidikan terakhirnya di Fakultas Pertanian Universitas Papua Manokwari, Bu Yos lulus dengan gelar Sarjana Peternakan pada tahun

Ms Yos LeviYoku, S.Pt, is the person behind the success of the Jayapura District Low-Emissions Development Initiative Working Group (IPRE), which was the first group formed in Papua Province. It received recognition from the provincial government for its success in preparing local mitigation actions to support low-emissions development in Jayapura District.

Yos Levi Yoku, known affectionately simply as 'Bu Yos', was born in Jayapura 48 years ago. She graduated from the Faculty of Agriculture of Manokwari University in 1993. The fourth child of four siblings, she was born to Barnabas Yoku and Agustina Suebu. She started her career as an educator in the Regional

1993. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Barnabas Yoku dan Agustina Suebu ini memulai karirnya sebagai tenaga pengajar di Sekolah Pertanian Daerah di Jayapura dibawah asuhan Pemerintah daerah Jayapura, sebelum akhirnya menjadi pegawai negeri sipil di Bappeda Kabupaten Jayapura pada tahun 1996.

Perjalanan karir Bu Yos tidaklah mudah, satu hal yang berkesan di hidupnya sebelum bekerja di Bappeda melalui tes di Pemerintah Daerah Jayapura, ketika ia tidak lulus setelah mengikuti tes di salah satu instansi di Jayapura. Kegagalan itu mengajarkannya untuk menjadi orang yang menerima apapun yang diberikan Tuhan, hingga akhirnya ketika di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kabupaten Jayapura dengan karir yang terus menanjak, ia merasa inilah jalan Tuhan, jalan yang membawa dirinya dapat berbuat banyak untuk orang lain.

Awal karirnya di Bappeda Jayapura diawali di bagian surat menyurat selama satu tahun dan kemudian menjadi Kepala Seksi Bidang Lingkungan dan selanjutnya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian selama tujuh tahun. Pada tahun 2007 Bu Yos kemudian menjadi Kepala Bagian Pertanian selama dua tahun dan sempat menjadi Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebelumnya akhirnya menjadi Kepala Bidang Ekonomi pada September 2009.

Sejalan dengan karirnya yang gemilang, Bu Yos juga tidak pernah lupa menjadi seorang istri yang baik untuk sang suami Soleman Taniau yang telah menikahinya selama 21 tahun. Pekerjaannya sebagai abdi negara tidak membuatnya melupakan kodrat sebagai ibu bagi Hiyo Raynaldi Taniau yang sekarang sedang meraih cita-cita menjadi seorang dokter di Universitas Cenderawasih, Fransen E.S. Taniau, Nancy E.S Taniau dan Alice R.S. Taniau yang masih berumur empat tahun.

Bu Yos melewati masa kecilnya dengan menyaksikan perkembangan yang cukup pesat di Papua dari tahun ke tahun, khususnya perubahan lingkungan. Beliau bercerita pada tahun 1980-an kabut di Jayapura masih rendah, yang membuat udara masih terasa sejuk dan segar. Namun, mulai tahun 2000 kabut mulai terangkat tinggi, hal itu dikarenakan salah satunya karena proses pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Pembangunan di Papua dirasakannya sudah berjalan cukup baik walaupun memang secara ekonomi masih agak lambat khususnya di daerah yang sulit

Agriculture School of Jayapura under the auspices of the Jayapura Regional Government before becoming a civil servant with Jayapura District Development Planning Agency (Bappeda) in 1996.

Bu Yos's career was not without challenges. One event that left an indelible impression on her before joining Bappeda was when she failed an admission test for an agency in Jayapura. The failure taught her to be someone who 'will accept anything that God presents'. When she was finally accepted as a civil servant with Jayapura Bappeda, her career thrived. She believes that this is the path laid down by God, which will lead her to a place where she can do the most for others.

She started her career with Jayapura Bappeda in the correspondences unit, serving there for a year, before being appointed as head of the Environmental section and later head of Personnel for seven years. In 2007, Bu Yos became head of the Agriculture department, where she served for two years. She was also head of Control and Reporting before finally becoming head of the Economic department in September 2009.

Concurrent with her career development, Bu Yos never neglected her duties as a wife to her husband Soleman Taniau, to whom she has been married for 21 years. Her responsibilities as a civil servant have not made her forget her obligations as the mother of Hiyo Raynaldi Taniau—who is currently pursuing his medical degree at Cenderawasih University—Fransen ESTaniau, Nancy ES Taniau and Alice RSTaniau, who is but four years-old.

Bu Yos went through childhood witnessing rapid growth in Papua, including changes to the environment. She tells about how the low mists that blanketed Jayapura in the 1980s made the air cool and fresh. Since the 2000s, however, the mists appear higher up. A phenomenon she believes has one cause in development that has not taken the environment into account.

She sees development in Papua as making good progress although the economy has been a bit slow, particularly in areas that are difficult to access. She believes, therefore, that to pursue development, transportation and accessibility need to be seriously considered.

Bu Yos considers that the people of Papua have strong customs that support the maintenance and management of the environment. For instance, when



dijangkau secara geografis. Sehingga menurutnya ketika membangun infrastruktur di suatu daerah faktor transportasi dan aksesibilitas perlu menjadi pertimbangan. Perempuan yang mempunyai hobi olahraga *volley* ini menilai masyarakat di Papua memiliki kebiasaan adat yang sangat taat dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Misalnya saat masyarakat menebang pohon untuk perladangan berpindah, masyarakat memiliki pola tebang-tanam-biarkan lalu berpindah lagi.

Perubahan lingkungan yang terjadi di rasakan sedikit banyak terjadi akibat dampak arus teknologi. Banyak dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Bu Yos dari arus teknologi di Jayapura. Dulu sebelum ada teknologi masyarakat banyak melakukan perladangan berpindah, namun semenjak ada teknologi informasi masyarakat mulai mengenal adanya pemupukan, pemberantasan penyakit, dan perawatan sehingga mulai melakukan perladangan menetap di suatu lokasi dengan tanaman yang lebih bervariasi. Dampak negatif dari teknologi yang sangat dirasakan adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kendaraan berlebihan, dan penggunaan berbagai macam benda elektronik yang menghasilkan gas emisi rumah kaca dan berdampak pada lingkungan.

Proses pembangunan di Jayapura yang berdampak kepada lingkungan membuat nya turut berpartisipasi di dalam Program ParCiMon dan LAMA-I. Bu Yos terlibat dengan Program ParCiMon dan LAMA-I mulai tahun 2012 namun karena sedang fokus pada pekerjaan, membuatnya belum terlalu aktif dalam kegiatan ParCiMon dan LAMA-I. Pada tahun 2014 ketika ada perubahan struktur di Bappeda, dan karena kedua program bersinggungan dengan permasalahan ekonomi maka ia pun mulai terlibat aktif dalam program tersebut. Partisipasinya yang sangat aktif di dalam program membuatnya terpilih menjadi Ketua Pokja IPRE.

Selama menjabat menjadi ketua Pokja IPRE Bu Yos merasakan banyak manfaat yang didapatkan. Secara pribadi, karena Pokja ini *multi stakeholder*, ia belajar untuk mengelola dan memutuskan suatu permasalahan. Keputusan yang di ambil tidak berdasarkan emosi, namun berdasarkan kesepakatan bersama. Pokja yang juga memiliki anggota dari kalangan perguruan tinggi yang termasuk orang-orang pandai, dan perwakilan masyarakat yang berbeda karakter satu dengan lainnya memberikan tantangan yang berbeda untuk dapat mengelola Pokja dengan baik.

farmers cut down trees to make space for short-term cultivation, they will replant before they move to cultivate another area.

The environmental changes are mostly due to rapid technological progress. Many positive as well as negative impacts have been felt by Bu Yos as a result of the advances made in technology in Jayapura. For example, before the introduction of technology, people practised shifting cultivation. These days, since the introduction of information technology, people have started to practise permanent agriculture at one location with more diverse crops, which Bu Yos feels is a good thing. She sees negative effects in the people's excessive use of motorized vehicles and electronic devices that emit greenhouse gasses and affect the environment.

The impact that development in Jayapura has had on the environment has driven Bu Yos to participate in the ParCiMon and LAMA-I projects. Bu Yos's involvement began in 2012, but because she was still much focused on her regular responsibilities she was not at that time active. In 2014, when a structural change was introduced at Bappeda, and because the two projects touched on economic issues, she gradually became more active. Since then, her highly active participation has led to her appointment as chairperson of the IPRE Working Group.



Secara kelembagaan dan pengembangan kapasitas la merasa ParCiMon dan LAMA-I ini sangat bermanfaat. Contohnya dari sisi perencanaan dan *monitoring* dan evaluasi Pokja IPRE mendapatkan pengetahuan baru bahwa sebelum mulai menentukan indikator, harus diketahui terlebih dulu prinsipnya, kriterianya, dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini akan lebih baik lagi apabila dapat dilakukan proses berkolaborasi dan memulai pendekatan dengan pimpinan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk di aplikasikan ke dalam program pemerintah daerah.

Bu Yos menguraikan pencapaian yang signifikan yang terjadi melalui kedua program khususnya dalam peningkatan kapasitas anggota Pokja. Melalui program ParCiMon dan LAMA-I, tim pokja IPRE sudah memiliki kemampuan di bidang teknis dan perencanaan kegiatan pembangunan yang berawasan lingkungan. Untuk mencapai keberhasilan tersusunnya delapan skenario aksi mitigasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Jayapura, telah melalui berbagai rintangan. Kendala waktu, prioritas pekerjaan dan dukungan kebijakan menjadi tantangan besar untuk dihadapinya sebagai ketua Pokja IPRE. Berbagai upaya dilakukan dalam mencapai tujuan Pokja yang telah di amanatkan kepada dirinya dan anggota Pokja IPRE.

Moto hidup perempuan yang gemar *travelling* ke lokasi yang menantang ini adalah "Dalam hidup kita harus berguna karena hidup ini hanya sekali". Moto hidup ini juga yang memacu dirinya untuk terus menggerakkan roda semangat tim Pokja IPRE. Kerja keras yang telah dilakukan oleh tim Pokja IPRE ini perlu disosialisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten Jayapura, untuk mendapatkan dukungan kebijakan yang dapat mendukung Pokja IPRE dan memberikan peluang pengembangan kegiatan yang lebih banyak.

Bu Yos berharap program ini dapat direplikasikan di kabupaten lainnya, ke depannya seluruh kabupaten turut melakukan upaya pembangunan rendah emisi yang akan berkontribusi pada penurunan emisi di Papua. Menurutnya jika satu provinsi melakukannya bersama-sama, dampaknya pun akan lebih besar. Beliau juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan memiliki pemahaman yang sama untuk dapat merencanakan pembangunan yang juga turut mengelola lingkungan, maka keberhasilan program ini tidak hanya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang telah bekerja keras bersama di Papua, namun juga di rasakan oleh masyarakat Indonesia dan dunia.

During her service as chairperson, Bu Yos feels there have been many benefits. Personally, as the working group is made up of representatives of several different stakeholder groups, she has learned to manage and decide on an issue. The decisions that she endorses are not based on emotions but on mutual agreement. The working group, which has members from different disciplines, such as academics and community representatives of varying characters, has posed unique challenges for her.

On the institutional- and capacity-building aspects, Bu Yos feels that ParCiMon and LAMA-I have offered many benefits. For example, from the planning and monitoring and evaluation side, the IPRE Working Group has learned that prior to determining indicators, they must be aware of the principles, criteria and objectives. It is also advantageous if collaboration is secured with government leaders, explaining that the project would be useful if applied to the regional government's programs.

Through the projects, the IPRE Working Group members have acquired technical and planning capacities for environmentally-conscious development. The process of establishing the mitigation scenarios for Jayapura has met with several major challenges: time constraints, work priorities and policy support.

But Bu Yos has as her motto: 'In our life we have to make ourselves useful, because we only live once.' This life philosophy has driven her to stoke the passion of the IPRE Working Group members. The hard work of the IPRE Working Group needs spread to the district government of Jayapura in order to establish policies that can support the group and provide it with more opportunities to develop more activities.

Bu Yos hopes that the program can be replicated in other districts and that all of the districts will practise low-emissions development. She believes that if a province can do this together that the impact will be greater. She also expects that all parties involved in development share a common understanding in order to plan for progress that manages the environment so that benefits will not only be reaped by those who have worked hard together in Papua but also by all communities in Indonesia and throughout the world.

*Text: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Center*

**ParCiMon** is designed to support Papua in achieving its low-emission development goal and contributing significantly to Indonesia's overall low-emission development as an integral part of climate-change strategies. It focuses on building the capacity of key civil society groups in Papua to participate and monitor the planning cycle of low-emission development from land-based sector

***ParCiMon** didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan*

**LAMA-I** aims to strengthen the capacity of key local governments to develop integrated low-emission development plans as part of Indonesia's nationally appropriate mitigation actions

***LAMA-I** berupaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi sebagai bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim nasional*

### **World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416

[www.worldagroforestry.org/regions/southeast\\_asia](http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia)



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK  
**DANIDA** INTERNATIONAL  
DEVELOPMENT COOPERATION



Research  
Program on  
Forests,  
Trees, and  
Agroforestry



**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

